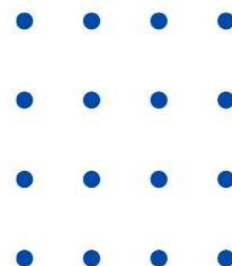





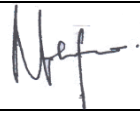
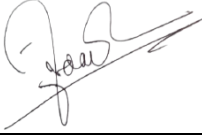
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI INSTITUT PRIMA BANGSA



Januari 2024





Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		05-02-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		05-02-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		05-02-2024
Penetapan	Mahfud, DR, M.Si., M.Kom	Rektor IPB CIREBON		05-02-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		05-02-2024

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) INSTITUT PRIMA BANGSA melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan INSTITUT PRIMA BANGSA meliputi unsur senat institut, Rektorat, dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku- buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma INSTITUT PRIMA BANGSA

Dokumen INSTITUT PRIMA BANGSA terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan INSTITUT PRIMA BANGSA Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar

tentang bagaimana pengelola dalam lingkup INSTITUT PRIMA BANGSA memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di INSTITUT PRIMA BANGSA dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar SPMI INSTITUT PRIMA BANGSA suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor INSTITUT PRIMA BANGSA. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di INSTITUT PRIMA BANGSA selalu kami harapkan dari semua pihak.

Hormat Kami

TIM LPM INSTITUT PRIMA BANGSA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. KOMPONEN STANDAR MUTU.....	2
1.3. PELAKSANAAN STANDAR MUTU	2
1.4. PEMANTAUAN STANDAR MUTU.....	3
1.5. PERBAIKAN STANDAR MUTU.....	3
BAB II STANDAR PENGELPLAAN ORGANISASI.....	5
1. STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI.....	6

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI

INSTITUT PRIMA BANGSA

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan dunia Pendidikan Tinggi yang juga tidak lepas dari perkembangan global, dituntut untuk terus mengikuti perkembangan tersebut dengan memberikan kelayakan mutu pendidikan yang pada akhirnya akan memberikan hasil berupa lulusan yang mampu berintegrasi dengan perkembangan dunia kerja.

Institut Prima Bangsa, yang selanjutnya akan disebut Institut Prima Bangsa, berusaha untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan memperhatikan arahan dari Pemerintah untuk menciptakan Standar Penjaminan Mutu pada berbagai aspek kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, agar Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat diselaraskan dengan berbagai kebutuhan yang terus berubah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di telah diatur pada Undang-Undang No.12 Tahun 2012 pasal 52 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijelaskan dengan Peraturan Mendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan barometer kegiatan yang sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses perumusan penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh dan mendapatkan kepuasan. Di lingkungan perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan terhadap pola pendidikan, hasil penelitian dan program pengabdian pada masyarakat.

Dalam uraian UU RI No. 12 tahun 2012, pada Pasal 54 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari:

- 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan
- 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian mengacu kepada Permendikbud No 49 tahun 2014, Institut Prima Bangsa menetapkan Standar Pendidikan Tinggi untuk setiap satuan pendidikan.

Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Institut Prima Bangsa dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam mewujudkan visi Institut Prima Bangsa, menjalankan

- misi Institut Prima Bangsa untuk sebuah tujuan Institut Prima Bangsa.
2. Untuk memacu Institut Prima Bangsa agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang bermutudan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
 3. Tolok ukur kompetensi atau kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Institut Prima Bangsa, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu di Institut Prima Bangsa dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur **ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)**.

Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Institut Prima Bangsa sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Institut Prima Bangsa.

1.2. KOMPONEN STANDAR MUTU

Komponen yang menjadi jaminan mutu Institut Prima Bangsa ditetapkan sebagai Standar Mutu Institut Prima Bangsa. Standar mutu ditetapkan oleh Institut Prima Bangsa dengan Peraturan Mendikbud No 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Prima Bangsa mencakup komponen- komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Prima Bangsa adalah:

I. STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Institut Prima Bangsa. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian standar tersebut.

1.3. PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Untuk mencapai keberhasilan proses dari mutu yang dihasilkan oleh Institut Prima Bangsa maka perlu disusun Penjaminan Mutu yang berlaku menyeluruh bagi kemajuan institusi Institut Prima Bangsa. Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur, budaya kerja serta kesadaran pada mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa di Institut Prima Bangsa, sangat

diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Institut Prima Bangsa hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Program Studi, Biro, dan SPMI sendiri sebagai Pusat Layanan membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 38 komponen Standar Mutu Institut Prima Bangsa dapat berjalan seperti yang diharapkan.

1.4. PEMANTAUAN STANDAR MUTU

Dalam suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah penting untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.5. PERBAIKAN STANDAR MUTU

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui.
3. Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
4. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
5. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;

6. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan.
7. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
8. Implementasi perbaikan hal ini berkenaan pada saat solusi yang diajukan jika berhasil menyelesaikan masalah, maka langkah yang sudah diambil dan ditempuh dapat dijadikan standar yang dapat dipergunakan untuk waktu selanjutnya.

BAB II

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

Visi, Misi dan Tujuan INSTITUT PRIMA BANGSA

Visi : Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
5. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
6. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

Tujuan :

1. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
2. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
3. Memperluas jejaring institusi dengan berbagai pihak untuk mendukung pendidikan dan penelitian.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan siap bersaing secara global.
5. Memperkuat kompetensi lintas budaya dan penguasaan bahasa asing.
6. Membekali lulusan dengan keterampilan abad ke-21 yang esensial.

Perlu untuk dibuat Standar Penjaminan Mutu Internal untuk dapat terus meningkatkan Standar Pendidikan di Institut Prima Bangsa yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat sekitar. Demikian pemaparan awal, untuk selanjutnya akan dijelaskan setiap Standar dalam bidang Pendidikan.

1. STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

1.1 Rasional

Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah strategis bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri di luar pembelajaran akademik. Melalui organisasi, mahasiswa belajar kepemimpinan, komunikasi, manajemen kegiatan, pengambilan keputusan, serta tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yang tidak hanya menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk pribadi yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing. Pengelolaan organisasi kemahasiswaan yang baik akan menciptakan iklim kampus yang demokratis, partisipatif, dan inklusif, sehingga mahasiswa dapat menyalurkan aspirasi, memperkuat solidaritas, serta mengembangkan keterampilan hidup (life skills) yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Selain itu, organisasi mahasiswa juga berperan sebagai motor penggerak kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung tercapainya kompetensi lulusan, termasuk penguatan soft skills, kewirausahaan, serta kepedulian sosial. Dengan demikian, rasional pengelolaan organisasi kemahasiswaan adalah memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai Institut Prima Bangsa, didukung oleh pembinaan dan pengawasan yang terstruktur, serta menghasilkan capaian nyata berupa mahasiswa yang berprestasi, adaptif, dan mampu menjadi pemimpin masa depan.

1.2 Definisi Istilah

1. Organisasi Kemahasiswaan adalah lembaga intra kampus yang dibentuk oleh mahasiswa, diakui dan dibina oleh perguruan tinggi, serta berfungsi sebagai wadah pembelajaran kepemimpinan, komunikasi, demokrasi, dan pengembangan potensi diri mahasiswa.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa tingkat institut/fakultas yang berperan sebagai lembaga eksekutif mahasiswa untuk menjalankan program kerja dan menyalurkan aspirasi mahasiswa.
3. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA) adalah organisasi mahasiswa di tingkat program studi yang berfungsi sebagai wadah pengembangan akademik, profesi, serta kegiatan penunjang pembelajaran mahasiswa.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah pengembangan minat, bakat, kreativitas, kewirausahaan, seni, budaya, olahraga, kerohanian, dan bidang lainnya yang difasilitasi oleh perguruan tinggi.

1.3 Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Legalitas organisasi	Setiap organisasi memiliki SK pengesahan dan tercatat di bagian kemahasiswaan.
2	Struktur dan kepengurusan	Organisasi (BEM, Hima, UKM) terbentuk aktif dan kepengurusan dipilih secara demokratis.
3	AD/ART dan program kerja	Setiap organisasi memiliki AD/ART serta program kerja tahunan yang disahkan.
4	Pembinaan	Pembinaan dilakukan secara rutin, evaluasi organisasi minimal 1 kali/tahun.

5	Pengembangan <i>sift skill</i>	Organisasi melaksanakan minimal 2 kegiatan pelatihan/kepemimpinan/pengabdian setiap tahun.
---	--------------------------------	--

1.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Penguatan legalitas dan tata kelola

- a. Menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan yang jelas (AD/ART) mekanisme pemilihan dan alur kerja.
- b. Menerbitkan SK pengesahan organisasi setiap periode kepengurusan.

2. Pembinaan

- a. Menetapkan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan pembina sebagai penanggung jawab.
- b. Menyelenggarakan pertemuan koordinasi dan evaluasi organisasi secara berkala.

3. Pengembangan *soft skill* dan kepemimpinan

- a. Melakukan pelatihan kepemimpinan, manajemen organisasi dan komunikasi publik.
- b. Mendorong mahasiswa aktif dalam kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, dan kompetisi ilmiah maupun non-akademik.

4. Program kerja dan kontribusi

- a. Mewajibkan setiap organisasi Menyusun program kerja tahunan yang selaras dengan visi misi Institut Prima Bangsa.
- b. Memfasilitasi organisasi untuk ikut serta dalam kompetisi, seminar, atau forum lokal, nasional, dan internasional.
- c. Mengintegrasikan capaian organisasi ke dalam rekognisi prestasi mahasiswa (SKPI).

5. Monitoring, Evaluasi dan Publikasi

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi program kerja organisasi minimal sekali/tahun.
- b. Mendokumentasikan semua capaian organisasi sebagai bahan evaluasi AMI.
- c. Mempublikasi prestasi organisasi mahasiswa sebagai bentuk apresiasi dan promosi institusi.

1.5 Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor Perguruan Tinggi
2. Wakil Rektor 3
3. Pimpinan Program Studi
4. Ketua LPPM
5. Pimpinan Unit/Lembaga

1.6 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang system Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.